

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah upaya memajukan serta memperbaiki tatanan atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada, pengertian pengembangan berbeda dengan pengertian pembangunan, namun dalam aktualisasinya tidak mudah membedakan dua pengertian tersebut. Jayadinata (1997) kegiatan pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata dan berkesinambungan.

Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Kegiatan pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini merupakan upaya perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat diberbagai aspek kehidupan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, tetapi yang menjadi tantangan utama dari suatu pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan.

Dalam rangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar daerah atau antar wilayah. Disamping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara perkotaan dengan pedesaan. (Jayadinata, 1997)

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah akan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatkannya pembangunan yang dilaksanakan dalam penyediaan fasilitas kota. Adanya perkembangan fasilitas banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain geografis wilayah, sumberdaya atau potensi alamnya, kebijakan pemerintah, investasi baik lokal maupun asing, komunikasi, transportasi dan perkembangan sarana dan prasarana (Suparno, 2005).

Dengan semakin berkembangnya pembangunan, industri dunia, dan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan jasa pelayanan masyarakat akan semakin meningkat, sebab manusia semakin membutuhkan kenyamanan dan kemudahan dalam aktifitas sehari-hari. Sehingga keberadaan fasilitas umum sebagai sarana penyedia jasa yang bergerak dalam berbagai macam bidang terutama fasilitas pelayanan sosial yang mencakup pendidikan (TK, SD, SMP, SMA), kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik/Pustu, Posyandu, Polindes, Apotek), air bersih (PAM, air sumur, sungai/danau, membeli air minum), perumahan(perumahan permanen, semi permanen, tidak permanen, bukan tempat tinggal), rumah ibadah(mesjid, mushala, pura, gereja, wihara). Kemudian dalam bidang penyedia sarana fasilitas pelayanan ekonomi yang mencakup bank, pasar, koperasi, pertokoan, kedai. (Rahardjo, 2006).

Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ketahun juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk yang besar memerlukan berbagai fasilitas pelayanan sosial ekonomi dalam mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Dengan demikian pembangunan itu telah memberikan hasil bagi kehidupan penduduk, tetapi

pembangunan itu belum merata di berbagai bidang termasuk dalam sektor fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

Permasalahan itu timbul disebabkan oleh (1) kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurang kerjasama, (2) selama ini pola perencanaan pembangunan mengartikan makna partisipasi sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya dan (3) kurang kesiapan masyarakat atau sumberdaya manusia padahal sumberdaya alam jumlahnya relatif besar, ini memerlukan pengelolaan yang lebih intensif agar mampu memiliki produktifitas yang tinggi (Junaedi, 1999). Dalam mengatasi masalah yang terjadi, pemerintah telah melaksanakan pembangunan secara desentralisasi artinya bahwa setiap daerah diberi wewenang untuk mematuhi dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kepentingan daerahnya agar terwujudnya pemerataan pembangunan.

Keadaan tersebut tidak terlepas dari jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat, ini ditunjukkan penduduknya pada tahun 2010 berjumlah 237.560.000 jiwa(Badan Pusat Statistik 2010). Pertambahan penduduk menuntut adanya pertambahan fasilitas. Jumlah penduduk yang menggunakan atau yang menikmati pelayanan mencerminkan keinginan atau kepuasan terhadap suatu pelayanan. Makin tinggi tingkat kepadatan pelayanan berarti terdapat kecendrungan untuk menambah fasilitas pelayanan agar mampu melayani peningkatan permintaan pada masa depan, sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk (Sudyohutomo, 2008).

Seiring dengan perjalanan dari waktu ke waktu, pada umumnya kota Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami penambahan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan penyediaan berbagai fasilitas. Tampaknya keadaan ini tidak seimbang dengan keterediannya fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang mencakup pendidikan (TK, SD, SMP, SMA), kesehatan (Rumah Sakit puskesmas, poliklinik/pustu, Posyandu, polindes, apotek), air bersih (PAM, air sumur, sungai/danau, membeli air minum), perumahan (perumahan permanen, semi permanen, tidak permanen, bukan tempat tinggal), rumah ibadah (mesjid, mushala, pura, gereja, wihara). Kemudian dalam bidang penyediaan sarana fasilitas pelayanan ekonomi yang mencakup bank, pasar, koperasi, pertokoan, kedai. (Muta'ali 2000). Ketersediaan fasilitas pelayanan itu disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota berbeda termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Kecamatan Karang Baru.

Kecamatan Karang Baru merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Tamiang. Penduduk di Kecamatan ini pada tahun 2010 berjumlah 35.978 jiwa (BPS Kabupaten Aceh Tamiang dalam angka 2010) yang tersebar di 31 desa dengan luas wilayah 139,45 Km². Seluruh penduduk tersebut tentu membutuhkan berbagai fasilitas untuk memenuhi kehidupannya. Namun tidak jarang dari berbagai fasilitas pelayanan tersedia tetapi belum mencukupi menyebabkan tidak seluruhnya penduduk dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan dan tidak semua meningkatkan taraf hidupnya. Apabila situasi ini dibiarkan berkelanjutan, maka pembangunan akan semakin timpang dan masalah fasilitas sosial ekonomi seperti pada fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, olahraga,

keagamaan, pasar, toko, kios atau warung, angkutan umum dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dianalisis ketersediaan fasilitas pelayanan sosial di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah ketimpangan jumlah penduduk serta luas wilayah yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang mencakup pendidikan(TK, SD, SMP, SMA), kesehatan (Rumah Sakit puskesmas, poliklinik/pustu, Posyandu, polindes, apotek), air bersih (PAM, air sumur, sungai/danau, membeli air minum), perumahan (perumahan permanen, semi permanen, tidak permanen, bukan tempat tinggal), rumah ibadah(mesjid, mushala, pura, gereja, wihara). Kemudian dalam bidang penyediaan sarana fasilitas pelayanan ekonomi yang mencakup bank, pasar, koperasi, pertokoan, kedai di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya cakupan masalah yang ada dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, agar masalah dalam penelitian ini menjadi terarah serta fokus, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam fasilitas pelayanan sosial yang mencakup pendidikan(SD, SMP, SMA), kesehatan (Puskesmas, pustu, BKIA, Rumah

Bersalin dan apotek) dan fasilitas pelayanan ekonomi (Bank, kios/warung, pasar dan pertokoan) di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka di dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya dalam bentuk pertanyaan, antara lain

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan yang terdiri dari tingkat SD, SMP, SMA berdasarkan jumlah unit sekolah dengan jumlah penduduk dan ruang kelas dengan jumlah usia anak sekolah di Kecamatan Karang Baru.
2. Bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, BKIA, Rumah bersalin, pustu, dan apotek berdasarkan jumlah jumlah unit dengan jumlah penduduk di Kecamatan Karang Baru.
3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi yang terdiri dari Bank, kios/warung, pasar dan pertokoan berdasarkan jumlah unit dengan jumlah penduduk di Kecamatan Karang Baru.

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

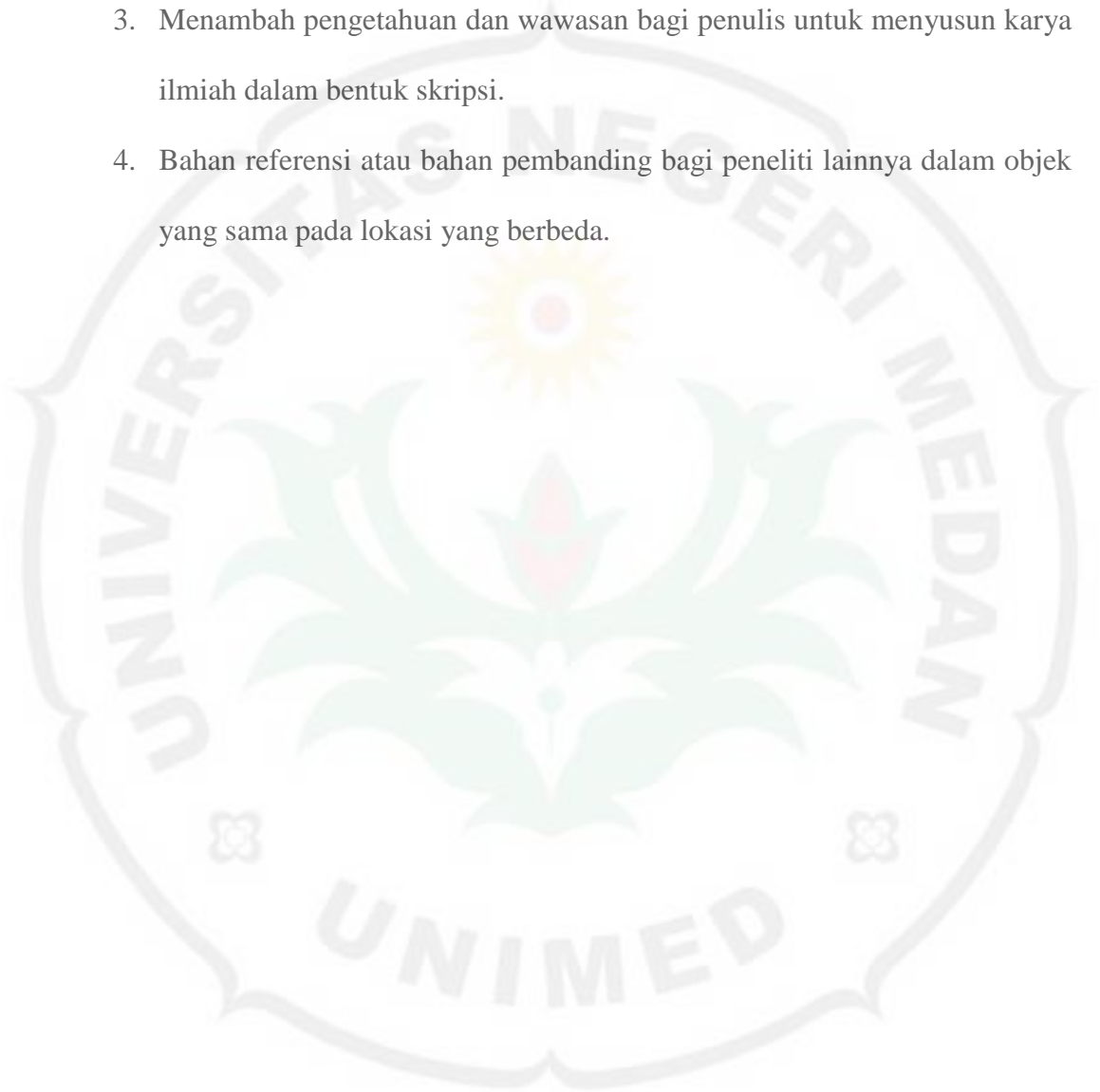
1. Mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan yang terdiri dari tingkat SD, SMP, SMA berdasarkan jumlah unit sekolah dengan jumlah penduduk dan ruang dengan jumlah usia anak sekolah di Kecamatan Karang Baru.
2. Mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari Puskesmas, BKIA, Rumah bersalin, pustu, dan apotek berdasarkan jumlah jumlah unit dengan jumlah penduduk di Kecamatan Karang Baru.
3. Mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi yang terdiri dari Bank, kios/warung, pasar dan pertokoan berdasarkan jumlah unit dengan jumlah penduduk di Kecamatan Karang Baru.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang geografi.
2. Bahan informasi atau masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya pemerintah Kecamatan Karang Baru dalam mengambil kebijakan untuk membuat program pembangunan disektor fasilitas pelayanan sosial.

3. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
4. Bahan referensi atau bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam objek yang sama pada lokasi yang berbeda.



THE
Character Building
UNIVERSITY